

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Arti kata mengumumkan sesuai dengan pasal 1 (11) UUHC merupakan pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. sedangkan perbanyakan menurut pasal 1 (12), undang – undang nomor 28 tahun 2014 adalah penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena ada pembatasan – pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC 2014, artinya hasil karya cipta atau ciptaan bukan dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan

oleh masyarakat luas sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.

Sebagaimana diungkapkan diatas melalui pasal 1 angka 1 UUHC 2014 bahwa hak cipta yang mempunyai sifat khusus atau eksklusif itu baik bagi pencipta atau orang lain harus dilakukan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan – pembatasan tertentu ini UUHC 2014 telah memberikan sarana pada hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.

Pembatasan – pembatasan menurut perundang – undangan dimaksud sudah tertentu bertujuan agar dalam setiap penggunaan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang – wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu tersebut dihormati. Namun dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Untuk itulah undang – undang hakcipta ini bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.

Sama dengan hak milik lainnya, sudah tentu penggunaan hak cipta semata – mata hanya untuk kepentingan pribadi penciptannya belaka, apalagi kalau pemanfatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum. Penggunaan hak cipta harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut, sehingga mendatangkan kemanfaatab bersama dan demi kepentingan umum penggunaanya juga harus diingat bahwa tidk berarti kepentingan individu tadi terhadap hak cipta akan terdesak oleh kepentingan mayarakat umum.

Dalam hal ini, UUHC 2014 memperhatikan pula kepentingan kepentingan perseorangan haruslah saling mangimbangi , sehingga pada akhirnya akan terjadi tujuan pokok yang hendak dicapai dalam pemanfaatannya dapat juga dirasakan oran lain. fungsi sosial dari hak cipta ini terus melekat pada ciptaanya.¹⁶

2. Isi Hak Cipta

Terkait dengan isi hak cipta, dimana hak cipta berisikan hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak cipta tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hak ekonomi dari cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain atau penciptanya,

¹⁶ Saidin, 1995, *aspek hukum hak kekayaan (intellectual property right)* PT Rajagrafindo persada, jakarta hal 32-33

namun hak moral tidak dapat diperlakukan sama.¹⁷ Hak moral tetap mengikuti dan melekat pada diri penciptanya, walaupun hak ekonominya telah beralih atau dialihkan, yang dapat beralih dan dialihkan hanya hak ekonominya saja, sementara hak moral tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral dapat mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian penciptanya juga dapat mencegah bentuk – bentuk *distorsi*, mutilasi atau perubahan lain terhadap karya ciptaannya.

Hak ekonomi adalah hak untuk menapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan akasan apapun, walaupun misalnya hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atau ciptaan tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. hak moral diatur dalam pasal 5 -7 UUHC.

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak – hak ekonominya seperti kekayaan – kekayaan yang lain, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak

¹⁷ Rahmadi Usman, 2003, *hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, alumni, bandung, hal 1

cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak – hak ekonomi yang dapat di eksploitasi dari suatu ciptan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam rangka jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Pencipta masih memiliki hak – hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.

Hak moral adalah hak – hak pribadi pencipta atau pemegang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Makna hak moral seperti diatur dalam pasal 5 uuHC adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di ciptaanya ataupun dalinannya dalam hubungan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk – bentuk distorsi mutilasi atau bentuk pemotongan, kerusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Dalam penjelasan uuHC 2014 dinyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Sementara hak ekonomis adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pada hakikatnya hak ekonomis adalah hak mencakup semua kepentingan

ekonomis si pencipta yang mungkin saja dapat dialihkan kepada pihak lain. walaupun terkesan kedua hak itu diperlakukan berbeda, namun dalam melihat hak cipta secara utuh, maka eksistensi kepentingan moral dan kepentingan ekonomis tetap harus dilihat dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipandang secara terpisah dari awalnya untuk menentukan kepatutan dari sifat kepemilikan tersebut.

Sesuai dengan sifat manunggal atau menyatunya hak cipta dengan penciptanya, dari aspek moral seseorang atau badan hukum atau tidak dapat diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik mengenai judul, isi, apalagi nama penciptanya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila mendapat ijin dari penciptanya atau ahli warisnya jika meninggal dunia. Namun jika penciptanya tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal ini dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.¹⁸

3. Hak – Hak Yang Berkaitan dengan Hak Cipta

Adapun hak - hak yang berkaitan dengan hak cipta yang dimaksud adalah hak terkait, hak terkait adalah padanan *neighboring right* atau *related right*. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang diperuntukan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran masing – masing untuk, dalam hal pelaku untuk memberikan izin atau melarang pihak lain,

¹⁸ Ibid

memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau bunyi. Sedangkan bagi lembaga penyiaran untuk memberikan izin atau melarang pihak lain membuat memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas menyebutkan bahwa pemilik hak – hak terkait meliputi pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan produser rekaman suara yang menghasilkan karya pertunjukan produser rekaman suara yang menghasilkan karya siaran, selain ketentuan mengenai isi hak ditentukan pula jangka waktu perlindungan hukum dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku bagi hak – hak tersebut.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Lisensi Dan Royalti Hak Cipta Lagu Atau Musik

1. Lisensi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pencipta tidak selalu dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, para pencipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. Oleh sebab itu, pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain. Dalam kaitan pengalihan hak-hak ekonomi pencipta inilah muncul apa yang disebut dengan lisensi. Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik

¹⁹Eddy damian , *Op Cit* , hal 121

hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau akta. Dalam konteks Ciptaan lagu atau musik, pada dasarnya ada 5 (lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu:

- a) Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*);
- b) Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*);
- c) Lisensi sinkronisasi (*synchronization licenses*);
- d) Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (*print licenses*);
- e) Lisensi luar negeri (*performing licenses*).

Lisensi mekanikal (*mechanical licenses*) diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial bekewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga

penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada 23 umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*collective Administration of Copyright*) atau *Collecting Society* atau yang dalam disertai ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Lisensi Sinkronisasi (*synchronization licenses*) adalah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada seseorang atau pihak lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya.

Lisensi penerbitan lembar cetakan (*print licenses*) adalah lisensi yang diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk lagu nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

Lisensi luar negeri (*foreign licenses*) adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *user* di negara bersangkutan malah

diseluruh dunia. Disamping lima macam lisensi yang diuraikan di atas, dalam lingkungan hukum hak cipta di kenal istilah lisensi paksa atau lisensi wajib (*compulsory license*). Maksud dari lisensi wajib ini adalah bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat mewajibkan agar pencipta memberi izin untuk menerjemahkan, dan atau 24 memperbanyak ciptaannya. Walaupun disebut lisensi wajib, biasanya pencipta tetap juga mendapat imbalan, tetapi jumlahnya bukan berdasarkan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan sendiri oleh pemerintah.²⁰

2. Royalti

Royalti merupakan inti dari pada hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan mandek. Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti

²⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumnya*, 2009., hlm 45-46

biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.

Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad emas dan perak, tambang-tambang emas, perak, gas alam dan minyak serta tambang-tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja. Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah diizinkan untung menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalty juga di gunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya.²¹

3. Hak Cipta Yang Diserahkan Kepada Orang Atau Pihak Lain Atau Badan Lain

Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain adalah sebagai berikut :

- a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain “untuk sebagian” maka bagian yang diserahkan itu pencipta tidak ada lagi haknya, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai hak sepenuhnya.

²¹Bernard Nainggolan ,*Op Cit*, hlm. 164-169

b. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak cipta itu. Pada prinsipnya bahwa seseorang dapat menuntut orang lain /badan yang melanggar hak ciptanya, juga ditambahkan hak mengadakan perubahan, yang mana izinnya tetap diberlakukan selama ia hidup. Hak-hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak-hak yang dapat diserahkan. Contoh: Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan, antara lain:

1. Memperbanyak hasil ciptaan,
2. Mengumumkan hasil ciptaan,
3. Menerjemahkan hasil ciptaan,
4. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun di televisi dan lain-lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:

1. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan,
2. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable rights* sekarang disebut *moral rights*.²²

C. Tinjauan Umum Mengenai Hubungan Hukum Secara Umum

²² Sophar Maru Hutagalung, *Op cit*, hlm. 18-19

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Atau dalam kata lain isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur :

1. Orang-orang yang berhak/kewajibannya saling berhadapan contohnya

A menjual rumahnya kepada B, maka :

- A wajib menyerahkan rumahnya kepada B,
- A berhak meminta pembayaran kepada B
- B wajib membayar kepada A
- B berhak meminta rumah A setelah dibayar

2. Obyek terhadap nama hak/kewajiban diatas tadi berlaku (dalam contoh tersebut : terhadap rumah)

3. Hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap obyek yang bersangkutan, contoh A dan B sewa menyewa rumah. Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yakni : kekuasaan/hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).

Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat :
Adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. Timbul Peristiwa hukum. Contoh :

- A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah
- Diatur oleh Pasal 1474 dan 1513 KUHperdata (dasar hukumnya)

- Terjadi peristiwa hukum (disebut perjanjian jual beli)

2. Hubungan Hukum Dibagi atas Dua

Hubungan hukum sepihak yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya.

Hubungan hukum timbal balik yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh perjanjian jual beli sebidang tanah Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli tanah

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

UUHC yang baru di sahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 22: Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta. Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Kemudian, UUHC ini juga memasukkan Bab khusus mengenai Lembaga Manajemen Kolektif pada Bab XII.

Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif ke dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen Kolektif, tentunya bagi banyak kalangan memang merupakan sebuah kemajuan yang berusaha diberikan oleh UUHC ini. Sayangnya, Pasal-pasal mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang ada pada UUHC ini masih tidak jelas. Bab XII mengenai Lembaga Manajemen Kolektif memang mengatur mengenai bagaimana LMK harus beroperasi di Indonesia dengan persyaratan-persyaratan. Pasal 87 mengatur bagaimana hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengguna. Berikut berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta:

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi

kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Berdasarkan Pasal 88 diatur mengenai bagaimana sebuah Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki izin dari Menteri untuk dapat beroperasi.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 30 memenuhi syarat:
 - (a) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - (b) Mendapat kuasa dari Pencipta Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait untuk menarik menghimpun dan mendistribusikan Royalti.
 - (c) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang

mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.

- (d) Bertujuan untuk menarik menghimpun dan mendistribusikan Royalti ; dan
- (e) Mampu menarik menghimpun dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
- (f) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Jika kita melihat kedua pasal tersebut di atas kelihatannya Pasal-pasal tersebut sudah cukup baik sampai kemudian muncul kata “nasional” pada Pasal 89 ayat (1) yang kemudian menghilang lagi pada ayat (2), (3) dan (4). Pasal 89 (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut;

- a) Kepentingan Pencipta; dan
- b) Kepentingan pemilik Hak Terkait (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

- (3) Untuk melakukan penghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat 31 (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Kata “nasional” pada Pasal 89 ayat (1) ini tentu saja membuat tidak jelas jika pada Pasal 87 dan 88 diatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif dengan segala persyaratannya, akan tetapi seolah-olah melakukan penyempitan pada Pasal 89. Ini dapat diartikan bahwa nantinya paling lama dua tahun setelah Undang-Undang ini berlaku maka hanya akan ada dua Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia. Maka dari itu paling lama dua tahun setelah Undang-Undang ini berlaku. Karena pada Pasal 121 huruf (g) Ketentuan Peralihan di sebutkan sebagaimana berikut: “Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun mengelola dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib

menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.”²³

2. Problematik Hak Ekonomi Pencipta di Bidang Hak Mengumumkan

Perkembangan teknologi telah mengakibatkan tidak terbatasnya pengeksploitasian ciptaan lagu terutama menyangkut pertunjukan dan penyiaran (*the performance and display*). Hak eksklusif pencipta menurut Marshall Leaffer mejadi sangat luas, yang akan mencakup semua tindakan mempertunjukkan, mempublikasikan, mengomunikasikan, menyiarkan dan lain-lain yang mengakibatkan karya cipta dapat dilihat dan didengar oleh orang lain. Adanya hak ini telah memberi peluang bagi peningkatan harkat dan martabat pencipta dan sekaligus melahirkan kewajiban baru bagi negara dalam upaya perlindungan hak cipta.

Seiring dengan pesatnya pertunjukan karya cipta tersebut serta tuntutan untuk melindungi hak cipta, muncul pertanyaan: Apakah sebenarnya yang disebut hak pertunjukan itu?. pada hakikatnya, tidak semua bentuk pertunjukan (termasuk penyiaran) karya cipta diposisikan sebagai hak eksklusif pencipta.

Dengan demikian, ada pertunjukan yang bersifat pribadi dan pertunjukan yang bersifat publik atau ditujukan kepada publik, dan yang

²³ Muhammad Saddam S, *Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Penarikan Royalti Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum, UNHAS, hlmn 28 - 31

masuk pada wilayah hak eksklusif pencipta adalah pertunjukan kepada publik. Masalahnya kemudian adalah pengertian dari “publik” itu. Dalam UU Hak Cipta Amerika Serikat, ada dua klausula yang membedakan pertunjukan privat dan pertunjukan public, yaitu:

Klausula pertama:

1. Mempertunjukkan . . . ditempat terbuka untuk umum atau tempat lain dengan sejumlah besar orang berkumpul di luar lingkungan normal keluarga dan kelompok sosial; atau
2. Menyiarkan atau komunikasi lain. . . ke tempat yang ditentukan dalam klausula pertama atau kepada publik, dengan menggunakan perangkat apapun dan dengan proses apapun, apakah anggota masyarakat yang menerima pertunjukan. . . menerimanya di tempat yang sama atau terpisah dan pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Klausula kedua:

Sebuah pertunjukan kepada umum terjadi ketika sebuah karya disiarkan/ditransmisikan. Sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-undang, sebuah karya ditransmisikan ketika karya itu dikomunikasikan dengan proses tertentu, dengan gambar atau suara 35 diterima di luar tempat si pengirim. Dengan klausula ini memungkinkan bagi pemilik hak cipta untuk mengawasi penyiaran karya, seperti oleh radio dan televisi, meskipun penerima tidak dikumpulkan di satu tempat dan tidak menerima pada waktu

yang sama. Prinsip yang sama berlaku untuk penyiaran segmen terbatas kepada publik, seperti penghuni kamar hotel atau pelanggan televisi kabel.

Dalam Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, sekalipun diberikan pengertian hak mengumumkan, tetapi tidak ada pembatasan (*limitation*) dari pengumuman yang bagaimana yang digolongkan sebagai hak eksklusif pencipta. Tidak masuk akal jika semua bentuk pertunjukan maupun penyiaran karya harus didasari lisensi dan membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Kegiatan memutar lagu pada pesta ulang tahun seseorang di rumah dan memperdengarkan musik di sekolah-sekolah pada saat tertentu sangat tidak pantas harus mendapat izin.

Problem lainnya dari *the performance right* ini adalah tentang bagaimana orang yang melakukan pertunjukan atau penyiaran mendapatkan lisensi dan membayar royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Pada umumnya, undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak mengatur teknis pelisensian, termasuk UUHC di Indonesia. Yang jelas, tidak mungkin pencipta atau pemegang hak cipta dapat melayani semua orang yang membutuhkan lisensi, dan sebaliknya pihak yang hendak melakukan pertunjukan atau penyiaran musik tidak mungkin juga harus menghubungi pencipta. Dalam kaitan ini, dibutuhkan peranan lembaga perantara atau lembaga yang dapat menjembatani pemegang hak cipta dan orang – orang yang akan melakukan pertunjukan atau penyiaran. Lembaga tersebut dapat dinamakan *Collective Management Organization* (CMO) atau *Performing Right Society* (PRS) atau *Collecting Society* (CS).

3. LMK Menjaga Keseimbangan Kepentingan Pencipta dan User

Selain pencipta lagu, pihak-pihak yang mendapat imbalan keuangan sebagai realisasi hak-hak ekonominya adalah artis pelaku (*performer*) dan produser rekaman suara. Pertunjukan seorang pelaku (*performer*) dan perbanyakan lagu melalui perekaman suara merupakan aspek yang paling penting dari hak pencipta dan pemegang hak terkait ini. Cara normal mengeksploitasi hak cipta atau hak terkait melibatkan pemberian lisensi untuk penggunaan karya tersebut, dalam bentuk perwujudan suatu pertunjukan atau perekaman suara.

Misalnya, dalam kasus lagu, lisensi berupa izin perlu didapatkan dari pencipta lagu atau musik apabila lagu atau musik hendak diperdengarkan atau dipertunjukkan atau disiarkan. Di atas telah disinggung bahwa dalam kenyataannya, tidak mungkin bagi pemegang hak cipta pertama untuk memantau penggunaan setiap karya-karyanya pada setiap kesepakatan di negara tertentu, apalagi di wilayah asing. Pemegang hak cipta tidak akan dapat dalam praktek memberi lisensi satu demi satu kepada pengguna lagu atau musik (*user*) dan mengumpulkan royaltinya, mengingat banyaknya pengguna potensial yang perlu dibuatkan lisensi di wilayah yang sangat luas (di negara tertentu dan di seluruh dunia). Pengguna lagu pun dalam posisi yang sama. Suatu badan usaha, seperti restoran, jika ingin memutar musik latar (*back ground music*) di restoran, atau jika stasiun siaran menyiarkan musik, jika 37 tidak

ada kerangka manajemen kolektif, lisensi terpisah akan diperlukan untuk setiap pertunjukan atau penyiaran karya.

Dalam hal stasiun siaran, ribuan lagu disiarkan melalui udara setiap tahun. Ini akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk pengguna tersebut untuk menemukan semua pemilik hak dan bernegosiasi dengan mereka masing-masing untuk mendapat lisensi secara terpisah untuk penggunaan karya yang diinginkan. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya pencipta lagu dapat memperoleh hak-hak ekonominya dari pengekploitasian ciptaannya dan bagaimana supaya pengguna lagu dapat dengan mudah menggunakan lagu tanpa melanggar hak cipta? Permasalahan pangadmistrasian hak ekonomi atau pengumpulan royalti itulah yang ditangani secara seksama oleh lembaga pemungut royalti atau LMK atau *Collective Management Organization*. Organisasi-organisasi ini menyederhanakan proses negosiasi dalam mengelola hak-hak anggota mereka, dan bertindak sebagai titik kontak tunggal untuk pemberian lisensi dan pembayaran royalti berdasarkan lisensi penggunaan karya musik (*blanket license*), baik untuk pertunjukan maupun penyiaran. Jadi, LMK melayani dan menjembatani kepentingan pencipta lagu dan pengguna (*user*) lagu.

Di tiap negara, biasanya ada satu LMK untuk satu kategori karya cipta, misalnya LMK untuk karya musik atau lagu atau LMK untuk karya buku, meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Baik melalui tugas atau mandat dari pemilik hak, LMK pada gilirannya menjadi bertanggung jawab untuk

memberikan lisensi untuk pengguna atas nama pemilik hak dan mengumpulkan royalti. Sistem pengelolaan hak oleh LMK ini menguntungkan bagi pemegang hak serta pengguna atau *user*. Di satu pihak, pemegang 38 hak, seperti komposer misalnya, akan mampu mencurahkan waktu mereka untuk fokus pada aktivitas kreatif mereka, tanpa harus khawatir tentang pengelolaan dan administrasi hak-hak ekonomi mereka. Di pihak lain, secara paralel, pengguna akan terlibat dengan hanya satu badan dari pada harus mencari izin dari setiap pemilik hak, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

Dengan *blanket license*, para pengguna karya memungkinkan untuk menggunakan karya apapun dalam repertoar yang dikelola oleh LMK. Penerapan *blanket lisence* jauh lebih efektif dari pada lisensi terpisah. Dalam hal ini LMK tidak lagi harus memeriksa karya mana yang dipertunjukkan atau digunakan pada setiap kesempatan. Sebaliknya LMK hanya memeriksa apakah *blanket lisence* telah diterapkan LMK, misalnya “lisensi per acara”. Tentang royalti yang dikumpulkan, LMK lebih lanjut mendistribusikannya kepada anggota atas dasar penggunaan karyakarya mereka. LMK mendistribusikan royalti ini kepada anggota mereka setelah dikurangi biaya administrasi. Beberapa LMK menerapkan pengurangan biaya untuk tujuan sosial atau pengembangan budaya. Berbagai metode dapat diterapkan dalam pendistribusian royalti agar anggota menerima bagian yang sesuai dengan penggunaan karya mereka. Salah satu metode

tersebut adalah menghitung royalti kepada setiap anggota berdasarkan bukti statistik.²⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Rumah Karaoke

1. Pengertian Rumah Karaoke

Karaoke berasal dari bahasa Jepang yaitu kara dari kata karappo yang berarti kosong dan oke dari kata okesutura atau orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal. Meski awalnya hanya sekedar hiburan untuk melepas kepenatan, kini karaoke telah menjelma menjadi salah satu bagian yang dianggap mempunyai andil dalam perkembangan dunia musik. Bagaimana tidak, dengan karaoke setiap orang tanpa harus mempunyai suara bagus bisa langsung merasakan menjadi penyanyi sungguhan karena mereka menyanyi diiringi musik yang sama dengan yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya. Sehubungan dengan pemakaian lagu yang dimanfaatkan oleh pihak jasa karaoke dengan perlindungan Hak Cipta, menjadi penting untuk diketahui apa hak dari pencipta lagu.

Dari tahun ke tahun, tempat karaoke atau rumah bernyanyi selalu saja dihadapkan pada persoalan yang sama yaitu lisensi lagu. Pemilik rumah karaoke kerap dikecam dan digiring ke pengadilan, karena tidak memiliki lisensi atas lagu-lagu milik banyak musisi. Pengesahan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menghadirkan dampak positif

²⁴ Muhammad Saddam S, *Op cit*, , hlmn 32 - 38

khususnya bagi seniman musik di Indonesia. Aturan baru tersebut mengatur dengan lebih rinci hak-hak para seniman untuk lebih dihargai sebagai pekerja kreatif.

Dengan begitu, rumah karaoke wajib membayar hak atas lagu-lagu yang digunakannya. UUHC terdahulu hanya mengatur royalti bagi pencipta lagu, namun kini undang-undang juga mengatur hak bagi pihak terkait yakni produser rekaman serta pelaku pertunjukan alias penyanyi dan pemusik. Berdasarkan UUHC pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi berupa hak eksklusif terkait penggandaan, pendistribusian, dan penyediaan karya. Dalam konteks ini, rumah bernyanyi wajib membayar hak berupa penggandaan dan penyediaan lagu di unit usahanya.²⁵

Dalam pasal 9 undang – undang Hak Cipta bahwa setiap kegiatan yang memiliki hak ekonomi atau penggunaan secara komersial maka harus mendapatkan izin dari pencipta.

Pasal 9

1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana di maksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan ciptaan
 - b. Penggandaan ciptaa dalam segala bentuknya
 - c. Penerjemah ciptaan

²⁵ Rahmi Suci, *Angin Segar Bagi Musisi Tanah Air Dirumah Bernyanyi*, dalam <http://www.cnnindonesia.com>, diakses 7 Mei 2017

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan ciptaan
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komunikasi ciptaan dan
 - h. Penyewa ciptaan
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Bahwa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 didalam Ketentuan Pasal 10 dimaksudkan bahwa setiap pusat perdagangan baik itu dalam skala kecil maupun besar (mall) harus bisa mengontrol dan mencegah setiap jenis usaha yang ada didalamnya yang menggunakan atau memanfaatkan hak-hak yang terdapat didalam hak cipta yang pemanfaatannya secara komersial harus tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tersebut diharapkan bisa melindungi pencipta dan pemilik hak terkait serta pemegang hak cipta dari tindakantindakan pemanfaatan atas hak-hak mereka secara tidak benar (tidak memberikan izin) dan ketentuan Pasal 10 ini juga menekankan bahwa setiap tempat usaha yang berada dilingkup

tempat perdagangan, misalnya rumah karaoke, cafe dan usaha lainnya yang sejenis yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk hak terkait untuk kepentingan komersilnya, harus benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

2. Teori Pasca Bayar dan Pra Bayar dalam Teori Ekonomi

Istilah *prabayar* secara semantik akan menghasilkan makna “sebelum membayar” artinya belum dibayar, artinya lagi itu hanya sebuah konsep pembayaran biasa, di mana setelah selesai melakukan transaksi jual beli barulah biayanya dibayar atau dilunasi. Contoh: Paket itu dikirim secara prabayar. Berarti, paket itu dikirim secara belum dilakukan pembayaran. Namun, entah mengapa yang melekat pada masyarakat kita justru makna “Paket itu dikirim dengan cara membayar sebelumnya”. Makna ini memang benar, tetapi untuk makna semantik dari kata *prepaid*, bukan *prabayar*.

Istilah pascabayar yang disetarakan dengan istilah *paid* dalam bahasa Inggris. Kata *paid* yang berarti (telah) membayar atau lunas bisa saja setara dengan konsep pascabayar yang memiliki makna sesudah (dilakukan) membayar. Atau justru *pascabayar* memiliki makna yang diperkenankan seperti dalam konsep *prabayar*. Proleksem “pasca” adalah bentuk terikat yang memiliki makna sesudah, jika digabungkan dengan kata “bayar” maka akan menimbulkan makna “sesudah bayar”. Inilah makna yang justru diharapkan hadir dalam istilah *prabayar*, bukan? Contoh: Paket itu dikirim secara pascabayar, maknanya paket itu dikirim secara sesudah (dilakukan) membayar/ pembayaran. Atau dengan kata lain, paket itu dikirim sesudah

kita membayarnya alias kita melakukan pembayaran terlebih dahulu baru akan mendapatkan barang atau jasa yang dikehendaki.

3. Pengertian Lagu di Rumah Karaoke

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain. Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.²⁶

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya rumah karaoke adalah sebuah jenis hiburan dimana sebuah mesin memainkan hanya musik dari lagu-lagu populer sehingga orang-orang dapat menyanyikan lirik lagu tersebut sendiri. Dalam memasukkan lagu tersebut rumah karaoke memiliki prosedurnya tersendiri dimana prosedurnya adalah pertama dengan memilih database lagu dimana database lagu ini akan dipilih oleh quality control yang bekerja pada rumah karaoke tersebut lalu selanjutnya akan diajukan ke lembaga manajemen kolektif, setelah mendapat persetujuan dari

²⁶ Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 55.

manajermen kolektif, selanjutnya lagu akan di masukan ke database rumah karaoke tersebut.

F. Tinjauan Umum Mengenai Keamanan Sistem Komputer

Sebagai gambaran umum Keamanan komputer atau dalam Bahasa Inggris computer security adalah keamanan informasi yang diterapkan / diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer memiliki tujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi.

1. Pengertian umum dari Keamanan komputer

Yaitu cabang ilmu teknologi atau yang lebih dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran utama dari keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau pengambilan yang tidak diizinkan oleh sistem, atau pemeliharaan ketersediaan, seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah usaha yang diterapkan untuk dapat mengamankan kinerja dan proses komputer dalam sebuah sistem. Penerapan computer security dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga dari seluruh sumber daya sistem agar tidak diganggu dan diubah, ditanam, dan diganggu oleh pihak luar yang tidak diizinkan dan tidak berwenang.

Pendekatan yang sering diterapkan untuk meningkatkan keamanan komputer yaitu dengan memberikan batas terhadap akses fisik pada

komputer, menerapkan mekanisme keamanan di perangkat keras dan juga pada sistem operasi untuk keamanan komputer.

2. Jenis Jenis keamanan Komputer

Berikut ini adalah jenis jenis keamanan komputer berdasarkan sistemnya :

1. Network Topology

Pada sebuah jaringan komputer terdapat beberapa jaringan yang bisa dibagi beberapa kelompok jaringan eksternal (Internet atau pihak luar) kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal diantaranya disebut DeMilitarized Zone (DMZ).

2. IDS / IPS

Intrusion detection system (IDS) dan Intrusion Prevention system (IPS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau dalam.

Pada IDS yang berbasis jaringan komputer , IDS akan menerima salinan paket yang ditujukan pada sebuah host dan kemudian IDS tersebut memeriksa paket-paket tersebut. Jika ditemukan adanya paket yang berbahaya dan mengancam, maka IDS akan memberikan peringatan pada pengelola/administrator dari sistem tersebut.

Karena paket yang diperiksa adalah salinan dari paket paket yang asli, maka jika ditemukan paket yang berbahaya dan mengancam maka paket tersebut akan tetap mencapai host yang ditujunya. Sebuah IPS

bersifat lebih aktif daripada IDS. IPS Bekerja sama dengan firewall, sebuah IPS dapat memberikan keputusan apakah sebuah paket dapat diterima atau tidak oleh sistem.

Kemudian apabila IPS menemukan paket yang dikirimkan adalah paket berbahaya, maka IPS akan memberitahu firewall pada sistem untuk dapat menolak paket data itu. Dalam membuat keputusan apakah sebuah paket data berbahaya atau tidak, IDS dan IPS dapat menggunakan metode “*Signature based Intrusion Detection System*” dan “*Anomaly based Intrusion Detection*”

3. Security Information Management

Salah satu alat bantu yang sering digunakan oleh pengelola ataupun administrator keamanan jaringan komputer adalah Security Information Management (SIM). Keamanan informasi manajemen ini berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara central dan terpusat. seiring perkembangannya SIM tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dari semua perangkat keamanan di jaringan komputer tapi juga memiliki kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data melalui teknik korelasi dan query data sehingga mampu memberikan peringatan dan laporan yang lebih lengkap dari masing-masing serangan yang mengganggu keamanan komputer.

Dengan menggunakan SIM ini, pengelola atau administrator jaringan komputer dapat mengetahui secara efektif jika terjadi serangan atau gangguan yang terjadi sehingga dapat melakukan

penanganan yang lebih cepat dan terarah, sehingga organisasi keamanan jaringan komputer tersebut lebih terjamin dan terjaga.

4. Packet Fingerprinting

Jenis keamanan pada sistem ini yaitu dengan melakukan packet fingerprinting, dimana pada keamanan ini kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan sehingga lebih mudah dalam mengontrol penggunaan jaringan dari sebuah sistem untuk banyak komputer yang terhubung

5. Port Scanning

Pada jenis keamanan komputer dengan metode Port Scanning pada umumnya sering digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Cara kerjanya dapat digambarkan dengan mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. maka dari itu jika port scanner menerima jawaban dari port lain, maka ada aplikasi yang akan bekerja ketika menerima koneksi pada port tersebut.²⁷

²⁷ Mbah Pc, *Pengertian Keamanan Komputer dan jenis – jenis keamanan komputer berdasarkan sistemnya*, dalam <http://www.mbahpc.net>, di akses tanggal 24 juli 2017